

## EDUKASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KAMPUNG SUSKUN DISTRIK ARSO TIMUR KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA

Rolling Swemptry Gaspersz<sup>1)</sup>, Viktor I. S Ajatanoi<sup>1)</sup>, Aria Aditya Setiawan<sup>2)</sup>, Yakop Tasik<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Teknik Pertambangan

<sup>2)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

\*[rollinggaspersz73@gmail.com](mailto:rollinggaspersz73@gmail.com), [viktor.isj@gmail.com](mailto:viktor.isj@gmail.com), [aria.adityas@gmail.com](mailto:aria.adityas@gmail.com)

[yakoptasik1983@gmail.com](mailto:yakoptasik1983@gmail.com)

### Abstrak

*Kampung Suskun adalah salah satu kampung di distrik Arso Timur Kabupaten Keerom provinsi Papua yang masyarakatnya masih dalam proses perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Penduduknya terdiri dari masyarakat majemuk yang sebagian besar adalah masyarakat asli Papua dan sisanya adalah masyarakat dari berbagai suku di seluruh Indonesia. Ada 3 (tiga) RT di kampung Suskun yaitu RT 1, RT 2 dan RT 3 yang rencana akan dimekarkan menjadi sebuah kampung baru maka sudah tentu membutuhkan berbagai dokumen pendukung untuk tujuan tersebut. Namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah dokumen-dokumen dimaksud belum ada. Oleh sebab itu maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah membantu mengadakan dokumen-dokumen tersebut dan mensosialisasikan manfaatnya kepada pemerintah dan masyarakat setempat. Kegiatan ini dimulai dari RT 3 yang mana merupakan salah satu RT yang rencana akan dimekarkan, dengan demikian tentunya membutuhkan sumbangsih pemikiran-pemikiran dan fisik guna tercapainya tujuan pemekaran. Metode pengabdian yang dilakukan adalah, melakukan survey terhadap lokasi pengabdian, melakukan pemetaan, sosialisasi manfaat dan penggunaan Peta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemeritahan kampung bagi masyarakat setempat, membuat peta topografi dan peta administrasi kampung, sosialisasi hasil pemetaan dan peta kepada aparat kampung dan masyarakat dan melakukan pemetaan masalah terkait pelaksanaan Good Governance. Hasil dari pengabdian ini adalah telah terbentuk peta-peta wilayah pemekaran, sehingga pelayanan publik dan pemahaman tentang pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di tingkat kampung seperti penataan wilayah kampung dan pengenalan prinsip-prinsip Good Governance terlaksana dengan baik. Terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang dibutuhkan dalam upaya pemekaran kampung.*

**Kata Kunci :** *Pemekaran, Pemetaan, Good Governance, Sosialisasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan.*

### 1. PENDAHULUAN

Situasi dan kondisi masyarakat akhir-akhir ini terganggu akibat pandemik Covid-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia dan juga perubahan-perubahan iklim dan cuaca karena pemanasan global. Walaupun demikian proses pembangunan di segala bidang tetap berlangsung. Untuk itu melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi akibat pandemik ini.

Beberapa aspek yang menjadi topik dalam kegiatan ini adalah yang terkait dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di tingkat kampung seperti pembuatan peta topografi dan peta batas wilayah serta pengenalan prinsip-prinsip Good Governance baik kepada aparat kampung maupun kepada masyarakat di kampung tersebut.

Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat (lihat gambar 1) yang diwakili oleh pengurus kampung maka dapat diketahui bahwa kampung tersebut dalam proses pemekaran dan membutuhkan beberapa dokumen. Salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah peta. Untuk itu maka melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat tersedianya peta yang diinginkan. Peta yang akan disiapkan adalah peta topografi dan peta batas wilayah. Peta topografi dan peta administrasi yang akan dibuat berguna untuk memberikan informasi tentang batas wilayah, sarana prasarana, bangunan, lahan, drainase dan lain-lain. Batas wilayah sebagai salah satu unsur peta Kampung maka perlu untuk dilakukan pemetaan secara detail karena batas wilayah terkadang bisa menjadi pemicu konflik antar wilayah kampung.



Gambar 1. Diskusi dengan Perangkat Kampung Yanemyo Desa Suskun

Pemetaan Kampung dilakukan sebagai implementasi Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, didefinisikan bahwa Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah kampung yang dinyatakan dalam bentuk Peta.

Kampung ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dalam hal ini bupati atau walikota. Undang-Undang tersebut pada Pasal 17 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Kampung menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Kampung diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Kampung dari Menteri disertai Lampiran Peta Batas Wilayah Kampung (BIG, 2016). Kampung atau Kelurahan dipandang sebagai pioner pemberdayaan potensi daerah, penyelesaian masalah dalam masyarakat, dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang harus diperhatikan kesejahteraannya.

Dalam pembuatan peta kampung bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif adalah metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan di wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri. Pemetaan partisipatif memiliki peran dalam melibatkan seluruh masyarakat setempat, proses yang berlangsung disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, proses pemetaan dan peta yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat, sebagian besar informasi yang terdapat dalam peta berasal dari pengetahuan masyarakat setempat, dan peta yang dihasilkan dapat digunakan sesuai kebutuhan masyarakat (Daud, 2012).

Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga akan memperkenalkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dengan cara partisipatif melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada tingkat Kampung. Dengan adanya prinsip-prinsip Good Governance, maka diharapkan tata kelola pemerintahan Kampung Suskun dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat dilayani secara baik dan tata laksana administrasi juga berjalan dengan lancar.

Good Governance secara sederhana diartikan sebagai Tata Pemerintahan. Tata Pemerintahan disini bukan hanya unsur pemerintah (government) saja sebagai eksekutif tetapi melibatkan dua unsur lain yaitu sektor swasta (private sector) dan masyarakat madani (civil society). Oleh karena itu, Good Governance menjelaskan tentang integrasi peran pemerintah yang terhubung secara erat dengan sektor swasta dan masyarakat dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.

Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, social, budaya, hukum, dan keamanan yang kondusif. Sementara sector swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan masyarakat harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, social, dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut (Saragi dkk, 2017, dan Batubara, 2013).

Masyarakat kampung diharapkan dapat menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung, dikarenakan partisipasi masyarakat merupakan implementasi nyata dari Good Governance. Apabila masyarakat telah melaksanakan perannya, maka akan dapat menentukan berbagai kebijakan pemerintahan di kampungnya. Selain itu, masyarakat juga dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di kampung tersebut.

## 2. METODE PENGABDIAN

Setelah melakukan survey terhadap lokasi, maka tim mendapatkan data bahwa masyarakat di Kampung Suskun Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom memiliki beberapa masalah yaitu :

1. Belum adanya Peta Batas Wilayah antar RT

2. Pengetahuan yang sangat rendah mengenai Good Governance. Solusi yang ditawarkan oleh tim adalah dengan melakukan sosialisasi tentang Good Governance kepada masyarakat dan perangkat kampung.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Abdimas Kampung Suskun dilakukan dengan dua instrument yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, serta pembuatan baliho yang berisi prinsip-prinsip Good Governance dengan melibatkan masyarakat dan perangkat kampung sebagai obyek utama. Tema utama yang ditanamkan kepada peserta sosialisasi ini adalah Good Governance itu hadir untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah terhadap masyarakat, menumbuhkembangkan potensi ekonomi masyarakat bekerjasama dengan sektor swasta, dan meningkatkan keaktifan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah (aparatus) kampung.

Dalam sosialisasi tersebut, tim abdimas Kampung Suskun juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat secara utuh merupakan jalan utama untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang demokratis, dimana dalam semua kebijakan yang disusun oleh pemerintah kampung fokus utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan. Artinya, kebijakan yang dibuat adalah representasi keinginan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dari kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Suskun, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, diharapkan aparat kampung bisa lebih memahami peran dan tupoksinya dalam tujuan untuk membuat masyarakat lebih baik dan sejahtera, dan masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam hal pembangunan dan pengawasan terhadap kinerja aparat pemerintah kampung.

Secara ringkas, untuk mengatasi permasalahan diatas, maka solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan survey terhadap lokasi
2. Melakukan pemetaan
3. Sosialisasi Manfaat dan Penggunaan Peta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kampung bagi masyarakat setempat.
4. Membuat Peta Topografi dan Peta Administrasi kampung.
5. Sosialisasi hasil pemetaan dan peta kepada Aparatus Kampung dan Masyarakat.
6. Melakukan pemetaan masalah terkait pelaksanaan Good Governance.
7. Melakukan Pembuatan Papan Informasi Prinsip-Prinsip Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik).
8. Sosialisasi Manfaat Prinsip-Prinsip Good Governance kepada Aparatus Kampung dan Masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan solusi permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan skema pelaksanaan pengabdian masyarakat, berikut akan diuraikan diperoleh hasil dan pembahasannya sebagai berikut :

### 3.1. Deskripsi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

#### a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilaksanakan selama 4 bulan dimana pengambilan data pemetaan akan menggunakan Theodolit, yang kemudian proses pengolahan data dan

penggambaran peta topografi untuk system drainage akan dilaksanakan di kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Sementara untuk pelaksanaan Sosialisasi Good Governance akan dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Peta Topografi kepada masyarakat di Kampung Yanemyo Desa Suskun.

**b. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat akan terletak di kampung Suskun distrik Arso Timur kabupaten Keerom provinsi Papua. Kampung Suskun adalah kampung yang terdiri dari 1 RW dengan 5 RT dimana RT 3, RT 4 dan RT 5 direncanakan untuk dimekarkan menjadi sebuah kampung yang baru dengan nama kampung Yanemyo. Lokasi pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini



Gambar 2. Peta Lokasi Kampung Suskun

**c. Persiapan Bahan dan Data Pendukung**

Sebelum pekerjaan dimulai maka tim akan menentukan terlebih dahulu persiapan bahan / data penunjang, peralatan yang akan digunakan. Peralatan yang digunakan harus memenuhi spesifikasi teknis yang ada sehingga data pengukuran memenuhi kriteria yang diinginkan. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan kordinasi.

**d. Alat dan Bahan**

Persiapan Peralatan Peralatan yang harus dipersiapkan untuk peta Topografi antara lain :

1. Alat ukur Theodolit yang mempunyai ketelitian pembacaan sudut terkecilnya 1 (satu) detik dan akurasi pengukuran jaraknya 5 + 3 ppm serta perlengkapannya.
2. Rambu ukur, Kaki Statik dan Payung.Kompas Geologi, GPS Garmin Etrex v10.
3. Tabel data
4. Roll meter

**3.2. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN**

**3.2.1. Pemetaan**

**a. Prosedur Pengukuran Lapangan**

Hal yang pertama dilakukan adalah dengan mempersiapkan peralatan dan juga anggota tim yang akan terlibat. Hal ini tidak jauh berbeda manakala sebuah jasa pemetaan sedang melakukan survei tanah. Kemudian, dilakukan komunikasi dengan pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan. Setelah itu orientasi ke lapangan serta melakukan pengukuran poligon (BM) serta

pembuatan tugu BM. Setelah segala sesuatu siap maka dilakukan pengukuran baseline dan existing (detail). Kemudian dilakukan perhitungan terhadap koordinat poligon, baseline, detil, tidak lupa juga mendokumentasikan setiap pekerjaan lapangan dan yang terakhir membuat laporan hasil pekerjaan lapangan.

**b. Mempersiapkan Peralatan dan Tim Lapangan**

Peralatan yang disiapkan adalah theodolite beserta kelengkapannya, kompas, roll meter, patok dan GPS. Alat ukur meteran yang digunakan adalah yang memiliki panjang 50 m dan 100 m. Alat komunikasi yang digunakan adalah handphone. Persiapkan pula alat elektronik penunjang kegiatan lainnya seperti Laptop, program penggambaran dan program pengolahan data. Selanjutnya dari persiapan tim meliputi koordinator lapangan, surveyor beserta asistennya dan tenaga pembantu.

**c. Berkoordinasi Kepada Pihak Terkait**

Ketika semua peralatan lapangan dan juga tim kerja sudah siap, maka dilakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kampung untuk mengetahui batas-batas wilayah agar tidak salah dalam pengukuran. Bentuk koordinasi dengan pihak kampung adalah yang berhubungan dengan surat izin, hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah kampung dalam kegiatan tersebut. Setelah itu tim survey dapat melakukan tugasnya yang diawali dengan orientasi lapangan. Hal ini sangat diperlukan karena lokasi yang akan ukur adalah lokasi baru yang belum dikenal.

**d. Pengukuran Poligon dan Existing**

Langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran poligon. Hal ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadikannya sebagai acuan dalam mengetahui titik kontrol pada semua rincian lokasi yang akan diukur. Metode yang digunakan dalam pengukuran poligon adalah dengan menggunakan metode poligon terbuka terikat. Pengukuran polygon diawali dengan membuat tanda awal pada titik dimulainya pengukuran. Selanjutnya melakukan pengukuran baseline yaitu dengan membentangkan garis ke tengah area yang terpasang setiap 100 meter atau lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian penggunaan patok-patok baseline ini agar mempermudah dalam melakukan monitor setiap pekerjaan. Pengukuran lapangan yang merupakan sebagai target adalah berupa ketinggian lokasi dari permukaan air laut. Setelah itu pengukuran jalan-jalan utama, jalur-jalur setapak, sungai, aliran air, selokan, perumahan rakyat dan fasilitas pemerintah kampung dan lain sebagainya seperti pada gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3. Proses Pengukuran

**e. Perhitungan Koordinator Poligon dan Baseline.**

Setelah melakukan patok poligon, maka hal yang petugas lakukan adalah menghitung koordinatnya dari hasil perolehan data lapangan. Metode dalam perhitungan ini adalah dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi surfer. Kemudian hasil perhitungan data itu berupa koordinat 3D tiga dimensi (X,Y,Z) menggunakan perangkat lunak autocad dan GIS. Lalu langkah selanjutnya menghitung koordinat baseline yang hasilnya mengacu dari data poligon.

**f. Penghitungan Koordinat Detail.**

Langkah selanjutnya ini menggunakan alat ukur theodolit dan roll meter sebagai alat ukur untuk mengukur titik-titik detail. Cara pengukuran dan pembacaan alat ukur sama dengan pengukuran polygon utama.

**g. Dokumentasi Lapangan.**

Dokumentasi lapangan dilakukan agar sewaktu-waktu dibutuhkan pengukuran ulang maka tim survey tidak kesulitan untuk menemukan lokasi yang akan diukur yang juga akan dibantu dengan informasi koordinat yang menggunakan alat ukur GPS. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah dilakukan pengukuran pada daerah tersebut.

**h. Sosialisasi Manfaat dan Penggunaan Peta**

Sosialisasi menjadi kegiatan terakhir yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang dihadiri oleh perangkat kampung dan masyarakat setempat, yang mana dalam hal ini sosialisasi yang disampaikan adalah tentang cara membaca peta topografi, peta situasi dan peta administrasi serta manfaatnya bagi pemerintah kampung dan masyarakat dan bagaimana mempraktekkan system pemerintahan yang baik seperti yang terlihat pada gambar 4 di bawah ini.



**Gambar 4. Sosialisasi Manfaat Peta**

**3.2.2. Good Governance**

Program Kegiatan Pengabdian Masyarakat utama berupa sosialisasi tentang Good Governance yang dibawakan langsung oleh t. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan satu buah baliho yang menggambarkan prinsip-prinsip Good Governance sehingga dapat memudahkan masyarakat memahami penjelasan tentang Good Governance. Kegiatan sosialisasi dimaksud dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini.



**Gambar 5. Sosialisasi Good Governance**

**4. KESIMPULAN**

Dari hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat di lakukan tim pengabdian di wilayah kampung Suskun RT 3 distrik Arso Timur kabupaten Keerom, telah menghasilkan Baliho Peta Topografi kampung. Dari peta topografi kampung masyarakat dan perangkat kampung dapat mengetahui batas-batas wilayah pemerintahan dan saluran drainase yang ada di wilayah tersebut. Baliho tentang Pemetaan Topografi dan Prinsip-Prinsip

Good Governance adalah masyarakat menjadi lebih tahu dan mengerti tentang pentingnya peta wilayah untuk menghindari adanya konflik batas wilayah administrasi pemerintahan dan penerapan Good Governance dalam kehidupan sehari-hari sehingga jalannya roda kehidupan dan roda pemerintahan di Kampung Suskun bisa semakin baik.

## 5. SARAN

Peta administrasi, peta topografi dan peta lokasi yang telah berhasil dibuat digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah, masyarakat setempat, pendatang baru atau pengunjung untuk memperoleh informasi tentang batas-batas wilayah, ketinggian, kemiringan lahan, letak dan posisi kampung Suskun RT 3 distrik Arso Timur kabupaten Keerom. Perlu adanya perawatan dokumen yang telah dibuat dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh masyarakat Kampung Suskun RT 03. Perlu diadakan pendampingan oleh Pihak Perguruan Tinggi terkait pengetahuan tentang Good Governance. Perlu adanya perhatian khusus oleh Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kabupaten terkait implementasi Good Governance di Tingkat Kampung.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian USTJ, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, selaku pimpinan Perguruan Tinggi, Wakil Rektor IV selaku penanggung jawab kerjasama antara Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) dengan masyarakat, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, selaku pengelola kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi sivitas akademik USTJ, Bapak Ketua RT 03 Kampung Suskun Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom sebagai pimpinan tempat terlanasanya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. Z. (2001). *Geodesi Satelit*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Anjasmara, I. M. (2005). *Sistem Tinggi, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Teknis Pengukuran dan Pemetaan Kota*, Surabaya
- Batubara, B.M., (2013). *Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA).
- Feathestone, W.E. (2006). *Height Systems and Vertical Datums: A Review In The Australian Context*, Curtin University of Technology
- Gillin. (2006). *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hardiansyah, M. Nasution, M.A. & Matondang, A. (2019). *Efektivitas Pelayanan Perangkat Desa oleh Kepemimpinan Kepala Desa (Datuk Penghulu) Tahun 2017*, PERSPEKTIF.
- Isnain, Nur. (2015). *Komparasi Penggunaan Media Google Earth Dengan Peta Digital Pada Materi Persebaran Fauna Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Semarang*. UNNES : Semarang (Media Informasi Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian)
- Kuswondo. (2013). *Analisa Tinggi Vertikal Sebagai Dasar Pengembangan Fasilitas Vital dan Penanggulangan Banjir*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Linhan. (2000). *Pemerintahan desa / marga*, Balai Pustaka, Jakarta
- Manalu, M. Nasution, H.T. Nasution, I. (2018). *Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara*, PERSPEKTIF
- Praasta, Eddy. (2001). *Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*. CV Informatika, Bandung.
- Ruslan, D. (2005). *Tata Pemerintahan yang baik (Good governance) dan Pembangunan Daerah*. Jurnal Kewarganegaraan.
- Sedarmayanti. (2007). *Good Governance*. Mandar Maju, Bandung.
- Syafri, Irawan dan Wuriyati, A. (1990). *Kondisi Datum Ketinggian Wilayah Sungai Di Pulau Jawa*. Bul. Pusair
- Undang-undang Otonomi Daerah. (2004), Harijaya Presindo, Jakarta